

OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAHAN DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

Intan Aviron Doromi
NPP. 30.1480

*Asdaf Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua
Program Politik Indonesia Terapan*

Email : intanavirondomi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Riswati, S. Pd., M. SI

ABSTRACT

Problem Statement / Background (GAP): Efforts to secure land assets located in Kabupaen Mamberamo raya are still not carried out properly. Therefore, the government needs regional asset management efforts, especially related to land assets. The majority of land assets owned by the Mamberamo Raya Regency Government do not yet have certificates, because most of the assets owned by the Mamberamo Raya Regency Government are delegated from Burumeso Regency. **Purpose:** This study aims to determine how to optimize the security of land assets owned by the Mamberamo Raya Regency Government. In addition, it is also to find out what obstacles in optimizing land asset security and what efforts are made in overcoming these obstacles. **Method:** The research method used in this study is a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data sources in this study are primary and secondary data sources. The data analysis techniques used are data collection, data presentation and conclusions. **Results:** The findings of this study show that the Regional Financial and Revenue Management Agency of Mambramo Raya Regency with the approval of the Regional Head of Mamberamo Raya Regency formed a deliberative team to negotiate with the parties concerned regarding the solution of land asset problems in the field, namely land adjacent to land owned by other parties. **Conclusion:** Optimization of land asset security owned by the Mamberamo Raya Regency Government is still not optimal. This is because in optimizing the security of land assets owned by the Mamberamo Raya Regency Government, both physical security, administrative security and legal security, there are still several obstacles.

Keywords: Optimization, Securing Land Assets, Inventory

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Usaha pengamanan aset tanah yang berlokasi di Kabupaen Mamberamo raya masih tidak dilakukan dengan tepat. Maka dari itu, pemerintah memerlukan usaha tata kelola aset daerah, khususnya terkait aset tanah. Mayoritas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya belum memiliki sertifikat, karena sebagian besar aset milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya merupakan pelimpahan dari Kabupaten Burumeso. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya. Selain itu juga untuk mengetahui hambatan apa saja dalam optimalisasi pengamanan aset tanah serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/ Temuan :** Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten mambramo raya atas persetujuan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo raya membentuk tim musyawarah untuk melakukan perundingan dengan pihak yang bersangkutan terkait solusi masalah aset tanah di lapangan yaitu tanah yang berdampingan dengan tanah milik dari pihak lain. **Kesimpulan :** Optimalisasi pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam optimalisasi pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya baik pengamanan fisik, pengamanan administrasi serta pengamanan hukum masih terdapat beberapa hambatan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Pengamanan Aset Tanah, Inventaris

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi dibutuhkan pelaksanaan tata kelola maupun prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif untuk mencapai tujuan dan cita-cita Negara. Sebagai upaya mencapai *Good Governance*, pemerintah pusat menjalankan program pemerintahannya dengan berdasarkan pada prinsip otonomi daerah yang memberikan tanggung jawab pada setiap daerah. Konsep pemerintahan selalu menghadapi yang disebut dengan transformasi paradigma menyerupai perubahan pada proses perkembangannya. Penerapan atau pelaksanaan berbagai prinsip *Good Governance* yang dibutuhkan oleh masyarakat terdiri dari beberapa bentuk, salah satunya adalah yaitu terbentuk serta tercapainya tata kelola aset yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 yang membahas mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 yang membahas terkait Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, kedua peraturan ini menyebutkan bahwa kebutuhan yang direncanakan merupakan suatu aktivitas di suatu daerah yang bertujuan untuk mengembangkan rincian barang yang di minta, kemudian dihubungkan dengan barang yang di beli pada masa lalu dibandingkan situasi sekarang sebagai upaya untuk bertindak dalam pengembangan permintaan di waktu yang akan datang. Awalnya, perencanaan dilakukan dengan berdasarkan kebutuhan serta kebebasan lahan melalui proses pelaksanaan negosiasi serta pembayaran terhadap masyarakat. Jika telah dilaksanakan negosiasi serta terpenuhinya kelengkapan dokumen tanah maka disusun surat keputusan mengenai penetapan tanah tersebut. Keputusan yang berupa surat tersebut ditujukan terhadap Bupati yang berlokasi di Kabupaten

Mamberamo Raya agar menetapkan aset di Kabupaten Mamberamo Raya sehingga tercatat dalam KIB A Tanah atau Kartu Inventaris Barang. Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 yang membahas mengenai Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, tata kelola aset daerah dilaksanakan dengan seefisien mungkin dengan tujuan dapat mempunyai manfaat terhadap daerahnya sendiri. Pada periode tahun 2020 yang lalu, pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya hanya memperoleh julukan opini WDP atau Wajar Dengan Pengecualian. Kemudian pada periode selanjutnya berdasarkan tinjauan dari Pemeriksaan Laporan Keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya pada periode tahun 2021 berhasil mencapai opini WTP Wajar Tanpa Pengecualian yang didapatkan dari kantor Perwakilan BPK berlokasi di Provinsi Papua. Pengamanan adalah perawatan dan penjagaan pada tiap asset yang ada di daerah dengan tujuan tidak diakui sebagai milik orang lain dalam penggunaannya. Di Provinsi Papua terdapat salah satu Kabupaten, yakni Kabupaten Mamberamo Raya. Pelaksanaan pemerintahan yang tepat, pemerintah daerah setempat berupaya untuk membentuk pemerintahan yang akuntabel dengan bukti bahwa BPKPD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki tanggung jawab terhadap Laporan Keuangan menghasilkan Laporan pada Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2021 memperoleh opini WTP. Akan tetapi, sekarang pada tata kelola aset daerah, Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya menghadapi berbagai kendala khususnya terkait pengamanan aset tanah. Usaha pengamanan aset tanah yang berlokasi di Kabupaten Mamberamo Raya masih tidak dilakukan dengan tepat. Maka dari itu, pemerintah memerlukan usaha tata kelola aset daerah, khususnya terkait aset tanah. Tata kelola aset terutama tanah dapat diawali dengan mengajukan pengadaan tanah sampai pada tahap dilepaskannya sertifikasi tanah agar menjadi tanah hak milik pemerintah di Kabupaten Mamberamo Raya. Peran substansi dan langkah strategis sangat dibutuhkan terkait pelaksanaan pengamanan aset tanah yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Mamberamo Raya agar tercapainya administrasi yang tertib. Selaras dengan tugas dan peran dari BPKPD Kabupaten Mamberamo Raya dalam pelaksanaan Pengendalian, inventarisasi, pemanfaatan serta pengamanan aset.

1.2 Kesenjangan masalah yang diambil (GAP Penelitian) Studi tentang Optimalisasi Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua memiliki GAP (kesenjangan) dalam penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Berikut adalah GAP yang mungkin ada dalam penelitian tersebut permasalahan Mayoritas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya belum memiliki sertifikat, karena sebagian besar aset milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya merupakan pelimpahan dari Kabupaten Burumeso.

1.3 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelitian dengan mengacu pada penelitian terdahulu sehingga peneliti dapat membandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu oleh Yosinta Kingkin Nurrobbani (2018). Dengan judul penelitian “Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.” Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Pengelolaan aset tanah pemerintah Kabupaten Purbalingga dilihat dari hasil penelitian membuktikan bahwa aset tanah milik pemerintah belum dikelola dengan baik karena masih terdapat permasalahan, salah satu permasalahannya adalah belum optimalnya pelaksanaan terhadap pengamanan aset dan pemeliharaan aset daerah tersebut. Penelitian selanjutnya oleh Putri Kusumawardani (2018). Judul penelitiannya “Manajemen Aset Tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang”. Metode yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini terdapat pengamanan aset secara inventarisasi yang di mana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses inventarisasi aset belum berjalan dengan baik, salah satu permasalahannya yaitu terdapat masalah dalam proses

penyajian aset khususnya pada tampilan keberadaan serta nilai asetnya. Peneliti selanjutnya oleh Siti Nurbaeti Said (2017). Dengan judul penelitian “Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan di Kabupaten Penjam Paser Utara”. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPKAD dalam pengelolaan aset tanah masih di temukan kekurangan, misalnya kurangnya koordinasi BPKAD dengan OPD lain sebagai pengguna barang milik daerah. Penelitian selanjutnya oleh Serly Wulandari (2014). Dengan judul penelitian “Optimalisasi dalam Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Kalimantan Barat.” Metode Eksploratif Kualitatif. Pengaman dan pemeliharaan aset belum berjalan optimal hal ini terlihat dari tidak semua pengelola BMD memahami aturan pedoman teknis , kepemilikan aset tanah yang belum bersertifikat serta terdapat BMD berupa aset tanah yang belum diserahkan penggunaannya kepada Pemerintah. Peneliti selanjutnya oleh Fitri Wulandari (2019) “Pengelolaan Aset Daerah Atas milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.” Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola aset daerah berupa tanah milik Pemerintah yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak terlaksana sesuai harapan. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya pemanfaatan berupa penyewaan pinjam pakai, kolaborasi antara masyarakat maupun swasta.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Optimalisasi Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Mamberamo raya Provinsi Papua. Penelitian ini lebih memfokuskan pada upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk optimalisasi pengamanan aset tanah milik daerah oleh BPKPD.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar memahami optimalisasi pengamanan Aset tanah milik Pemerintah Daerah oleh BPKPD Kabupaten Mamberamo raya Provinsi papua
2. Agar memahami faktor yang menghambat dalam optimalisasi Pengamanan Aset tanah milik Pemerintah Daerah oleh BPKPD Kabupaten Mamberamo raya Provinsi papua
3. Agar memahami upaya yang dilakukan BPKPD dalam mengendalikan aktor yang menghambat optimalisasi pengamanan Aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamberamo raya Provinsi papua

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan, sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Informan pada penelitian ini terdiri dari 5 narasumber dengan kriteria tertentu. Analisis data dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Optimalisasi Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Oleh BPKPD Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua

1. Pengaman Fisik

Upaya pengamanan fisik yang dilaksanakan oleh BPKPD Kabupaten Mamberamo raya dengan cara perlindungan fisik agar keberadaan aset tanah tersebut aman dan kondisinya terpelihara. Pengamanan terhadap aset tanah yang termasuk dalam aset tidak bergerak tersebut dilakukan untuk menjaga barang inventaris agar terhindar dari kerusakan fisik. Pengaman aset milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya khususnya dalam pengamanan aset berupa tanah juga harus memiliki sumber daya aparatur yang jumlahnya mencukupi agar pengamanan aset secara fisik berjalan maksimal, karena dengan minimnya sumber daya aparatur akan berdampak pada penanganan keamanan secara fisik aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo raya itu sendiri.

2. Pengamanan Administrasi

Pengamanan Administrasi menurut Suwanda (2015: 284) yakni kegiatan yang meliputi pencatatan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan. Sehingga pengamanan administrasi terhadap aset daerah berbentuk tanah diartikan menjadi kegiatan inventarisasi, penyimpanan, pelaporan, pencatatan, dan pembukuan dokumen milik atas tanah secara tertib. Upaya pengamanan administrasi yang dilakukan oleh BPKPD Kabupaten Mamberamo raya terhadap aset tanah milik pemerintah daerah dilakukan dengan cara pencatatan atau inventarisasi melalui Kartu Inventarisasi Barang A (KIB A). Semua aset tetap berupa tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Mamberamo raya tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang A (KIB A). Permasalahan yang terjadi mengenai aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya sekarang yakni ada aset tanah milik Pemerintah di Kabupaten Mamberamo raya yang berdempetan secara langsung dengan tanah milik sebelahnya. Catatan terkait tanah yang luasnya sebidang ada pada Kartu Identitas Barang A yang dimiliki pemerintah Kabupaten Mamberamo raya dan yang lainnya tercatat juga dalam milik masyarakat.

3.2 Faktor Penghambat BPKPD dalam Mengoptimalkan Keamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya

Faktor penghambat BPKPD dalam mengamankan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya sebagai Berikut:

1. Hilang dan rusaknya tanda plang atau papan kepemilikan. Ditemukannya kerusakan pada beberapa tanda plang atau papan atas nama kepemilikan aset sehingga menyebabkan tidak mampu terbaca kembali atau bahkan terdapat plang yang telah hilang. Situasi ini diakibatkan oleh pengabaian atau kurangnya pengawasan secara rutin terkait aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya. Pengawasan adalah salah satu langkah strategis dalam melaksanakan keamanan dan menjaga aset tanah, terutama secara pengamanan fisik. Tanda plang kepemilikan memiliki peran penting sebagai petunjuk identitas bahwa tanah tersebut adalah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya.
2. Sulitnya menemukan berbagai riwayat atau dokumen kepemilikan tanah sebagai tanah yang dilimpahkan. Setelah pemekaran Kabupaten Mamberamo raya aset tanah yang dilimpahkan didasarkan pada BAST atau Berita Acara Serah Terima serta tidak adanya dukungan dari berbagai dokumen lainnya, misalnya dokumen Letter C, Akta Jual Beli Tanah maka tidak mampu untuk diajukan dalam alur proses sertifikasi terhadap Badan Pertanahan Nasional.

3. Adanya perbedaan antara catatan data aset tanah dengan keadaan yang nyata atau sesungguhnya di lapangan. Aset-aset tanah di Kabupaten Mamberamo raya memiliki wilayah dengan luas yang berbeda antara catatan data yang dimuat dalam Kartu Identitas Barang A dan keadaan yang nyata yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh aset-aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya yang semulanya hanya sebidang tanah namun kemudian dibagian tengah dijadikan jalan yang diakses umum seiring berjalannya waktu. Peristiwa ini mengakibatkan pengurangan luas tanah dan menyebabkan catatan luas wilayah yang berbeda dalam Kartu Identitas Barang A dengan keadaan di lapangan.
4. Penyelesaian sebagai upaya lanjutan pengamanan aset mengalami kesulitan.
5. Rawan untuk diokupasi atau digugat oleh pihak lain. Sebagian wilayah Kabupaten Mamberamo raya adalah tanah milik Masyarakat. Namun ada aset-aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya yang berdempetan secara langsung. Situasi ini mengakibatkan adanya okupasi atau gugatan dari pihak terkait kepada aset tanah yang menjadi miliknya.
6. Penyelesaian sebagai upaya lanjutan pengamanan aset mengalami kesulitan.

3.3 Upaya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam Mengatasi Hambatan Optimalisasi Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya

Dalam menghadapi berbagai kendala ataupun permasalahan dalam proses pelaksanaan pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamberamo raya melakukan berbagai upaya sebagai berikut :

1. Pemasangan kembali dan perbaikan plang atau papan tanda kepemilikan
Tidak terpasang atau hilangnya papan nama di lokasi lahan aset milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya kemudian dilakukan peninjauan kembali sesuai situasi sesungguhnya serta melakukan inventarisasi terhadap aset yang sebelumnya tidak ditandai penanda kepemilikan Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya.
Pada tata kelola aset milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya terutama tata kelola pengamanan aset mencakup tanah sebaiknya dilaksanakan kontrol serta penjagaan oleh BPKPD secara rutin, sebab terbatasnya kewaspadaan pada aset tanah milik Pemerintah dapat menyebabkan masalah kehilangan dan kerusakan pada tanda milik aset atau plang.
2. Melakukan ketertiban secara Administrasi Tanah setelah Pemekaran Kabupaten Mamberamo raya yang tidak maksimal
Agar melaksanakan pengamanan secara administratif, terhadap aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya yang mayoritas adalah pelimpahan dari Kabupaten kasonaweja maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamberamo raya sebaiknya berusaha agar melengkapi kembali berbagai dokumen dan arsip tentang hak tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya sehingga dapat dilaksanakan sertifikasi tanah semaksimal mungkin pada Badan Pertanahan Nasional.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah akan bekerjasama dengan berbagai pihak dinas ataupun Kelurahan terkait selaras dengan otoritas sebagai upaya mencari informasi dan data yang memadai serta mampu mempertanggungjawabkan proses penerbitan sertifikat tanah sebagai dasar Badan

Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah kabupaten Mamberamo raya.

3. Melaksanakan Inventarisasi agar lahan dapat dipastikan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya

Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebaiknya melaksanakan aktivitas inventarisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya sebab ada berbagai aset tanah yang masih tidak ditemukan secara pasti lokasinya.

BPKPD sebaiknya mengidentifikasi lokasi pastinya aset tanah yang sebelumnya tidak ditemukan lokasinya. Maka dari itu BPKPD sebaiknya bekerjasama dengan Lurah wilayah setempat serta para Tokoh Masyarakat agar dapat mengidentifikasi secara pasti lokasi aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya.

4. Melaksanakan Survey ulang bersama pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamberamo raya.

Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya sangat bahaya dalam pengajuan gugatan sebab sebagian besar aset tanah di Kabupaten Mamberamo raya tidak mempunyai sertifikat. BPKPD Kabupaten Mamberamo raya sebaiknya mengadakan survey melibatkan pihak Badan Pertanahan nasional agar memastikan kebenaran antara catatan aset tanah dalam Kartu Identitas Barang A dengan keadaan di lapangan. Hal ini dilaksanakan agar dapat memastikan kesesuaian lokasi yang terdaftar dengan ukurannya selaras dalam Kartu Identitas Barang A sehingga dapat mengatasi peristiwa hak sengketa yang akhirnya akan mengarah ke gugatan terhadap pihak lain.

5. Mendampingi tata kelola aset terutama pada keamanan aset tanah bersama pihak kejaksaan.

Mayoritas aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya tidak mempunyai sertifikat sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamberamo raya sebaiknya melaksanakan pendampingan tata kelola aset terutama pada pengamanan aset tanah dengan pihak kejaksaan. Cara ini dilakukan agar pihak lain tidak ada yang mengklaim tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya serta sebagai upayaantisipasi dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya dalam melaksanakan Pengamanan aset tanah dalam bentuk pengamanan hukum.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa temuan penelitian terkait Studi tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2020 Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua yaitu *Pertama*, Optimalisasi pengamanan aset tanah yang dilaksanakan oleh BPKPD Kabupaten Mamberamo raya cenderung tidak maksimal. Sebabnya adalah adanya hambatan terkait keamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya melalui cara administrasi, fisik, serta hukum. *Kedua*, Hambatan dalam optimalisasi pengamanan tanah pada BPKPD Kabupaten Mamberamo raya sebagai berikut :Kehilangan dan kerusakan plang sebagai tanda milik, adanya kesusahan dalam menemukan berbagai riwayat dan dokumen sebagai aset yang dilimpahkan pada kepemilikan tanah, catatan pada data aset tanah berbeda dengan keadaan yang nyata atau situasi riil yang sesungguhnya, pihak lain akan melakukan gugatan dan okuvasi, penyelesaian sebagai upaya menindaklanjuti hasil mengalami kesusahan pada pengamananaset. *Ketiga*, Upaya yang dilakukan BPKPD dalam mengendalikan tantangan dalam optimalisasi pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya

sebagai berikut :Perbaikan dan memasang kembali plang atau papan namakepemilikan, penertiban administrasi tanah setelah pemekaran tidak dilengkapi, melakukan inventarisasi agar lahan dapat dipastikan sebagai aset Pemerintah Kabupaten Mamberamo raya, melakukan survey kembali dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamberamo raya, pelaksanaan dampingan tata kelola aset terutama pengamanan aset tanah bersama pihak kejaksaan.

IV. KESIMPULAN

Optimalisasi pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan dalam optimalisasi pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya baik pengamanan fisik, pengamanan administrasi serta pengamanan hukum masih terdapat beberapa hambatan. **Keterbatasan Penelitian** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian selanjutnya terkait hasil dari Optimalisasi Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua.

V. UCAPAN TERIMKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Kusumawardani, Putri. 2018. *Manajemen Aset Tanah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang*. Serang: Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Nurrobani, Yosinta Kingkin. 2018. *Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: Universitas Diponegoro.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Said, Siti Nurbaeti. 2017. *Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara*. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Cetakan Ketiga. Jakarta: PPM.
- Wulandari, Fitri. 2019. *Pengelolaan Aset Daerah Atas milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Wulandari, Serly. 2014. *Optimalisasi dalam Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak Kalimantan Barat*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik Vol.3 No. 01.